



Tantangan Etik Digital dalam Pembentukan Kewarganegaraan Digital: Sebuah *Systematic Literature Review* pada Generasi Muda

Cendana Tricia Januaristy Gultom^{1*}, Iqbal Arpanudin², Ardira Bunga Pramesty³
^{1,2,3}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia,

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed the lives of young people, particularly in how they interact, learn, and construct their sense of citizenship. This condition requires a deeper understanding of digital ethics as an essential component of modern citizenship education, especially within the context of school-based civic education, which plays a strategic role in shaping students' character. This study aims to examine the role of digital ethics in supporting the character development of young people through citizenship education implemented in schools. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA protocol to ensure transparency and accuracy in the literature selection process. The search was conducted through the Scopus database, resulting in 42 selected articles that were analyzed using VOSviewer to map key themes and conceptual relationships. The findings show that digital ethics is a crucial component of digital citizenship, contributing to the prevention of deviant behaviors such as cyberbullying, hate speech, and the dissemination of fake news. Furthermore, digital ethics fosters critical thinking, empathy, and social responsibility among students in digital environments. This study contributes by proposing a conceptual framework that highlights the importance of synergy between digital ethics and school-based citizenship education to develop a generation that is intelligent, critical, and ethical both online and offline.

Keywords: Digital etiquette; civic education; digital literacy; young generation

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan generasi muda, terutama dalam cara mereka berinteraksi, belajar, dan membangun identitas kewarganegaraan. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika digital sebagai bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan di era modern, khususnya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di sekolah yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran etika digital dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis sekolah. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA untuk memastikan transparansi dan akurasi proses seleksi literatur. Pencarian dilakukan melalui basis data Scopus, menghasilkan 42 artikel terpilih yang dianalisis menggunakan perangkat VOSviewer untuk memetakan tema-tema utama dan hubungan antar konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika digital merupakan komponen esensial dari digital citizenship yang berperan dalam mencegah perilaku menyimpang seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Selain itu, etika digital terbukti meningkatkan pemikiran kritis, empati, serta tanggung jawab sosial siswa di ruang digital. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka konseptual yang menegaskan pentingnya sinergi antara etika digital dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan beretika.

Kata Kunci: Etik digital; pendidikan kewarganegaraan; literasi digital; generasi muda

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang intensif bagi kehidupan, terutama bagi generasi muda. Media sosial, wadah digital pembelajaran pembaruan, aplikasi komunikasi, dan bahkan ruang kerjasama digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas remaja dan pelajar (Heitmayer M & Schimmelpfennig R, 2024; Mangkhang C & Kaewpanya N, 2021; Milenkova & Lendzhova, 2021). Sebagai penduduk asli digital, mereka tumbuh besar bersama teknologi dan memanfaatkannya untuk komunikasi, hiburan, pembelajaran, dan keterlibatan sosial-politik. Situasi ini mendatangkan keleluasaan sekaligus tantangan dalam membentuk ciri-ciri kewarganegaraan di era digital.

Konsep etiket digital telah muncul sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku individu di ruang digital, yang mencakup kesopanan, tanggung jawab, dan komunikasi yang etis (Bal E & Akcil U, 2024; Soler-Costa R, Lafarga-Ostariz P, Mauri-Medrano M, & Moreno-Guerrero A.J, 2021). Etiket digital tidak hanya untuk menjaga kualitas hubungan tetapi juga untuk melindungi hak individu dan membangun budaya digital yang sehat. Dalam pendidikan, etiket digital merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan karena menekankan nilai, norma, dan perilaku yang bertanggung jawab (Damiani V & Fraillon J, 2025; Tangül H & Soykan E, 2021). Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang berkarakter, berpikir kritis, dan berpartisipasi, yang kini harus mencakup ranah digital. Warga negara modern dituntut untuk beretika dan bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun virtual, sejalan dengan konsep kewarganegaraan digital, yang mencakup literasi digital, tanggung jawab sosial, keamanan digital, dan etiket digital (Connolly R & Miller J, 2022; Hamayel H. J & Hawamdeh M.M, 2022). Relevansi ini sejalan dengan fokus rumah jurnal integralistik, yakni mengkaji persoalan kewarganegaraan dalam dimensi multidisipliner yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etiket digital dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian penting untuk menjawab tantangan kebangsaan di era digital, sekaligus menegaskan cakupan integralistik jurnal ini.

Penelitian sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mempraktikkan etiket digital dapat meminimalkan risiko perilaku menyimpang seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran privasi (Alenezi N & Alfaleh M, 2024; Suing A, Alarcon-Llontop L. R & Bizberge A, 2024). Generasi muda yang sadar akan etiket digital juga lebih aktif dalam kegiatan kewarganegaraan digital, seperti diskusi publik, kampanye sosial, dan pelibatan warga negara berbasis teknologi (Assante G. M, Popa N. L & Momanu M, 2022; Han J, 2022; Slavković M, 2024). Namun, implementasinya dalam pendidikan masih belum sistematis. Penelitian Hidayat M. L, Hariyatmi Astuti D. S, Sumintono B, Meccawy M & Khanzada T. J. S (2023) menunjukkan bahwa guru sekolah dasar kesulitan mengintegrasikan kompetensi kewarganegaraan digital. Sementara itu, di Indonesia, literasi digital dan kewarganegaraan digital masih sporadis dan belum menjadi kebijakan nasional. Penelitian Prasetyo W. H, Naidu N. B. M, Tan B. P & Sumardjoko B (2021) menyoroti bahwa literasi digital dan kewarganegaraan digital masih jarang dan belum menjadi kebijakan yang melekat di tingkat nasional. Di wilayah Andes, keterbatasan infrastruktur dan disparitas sosial-ekonomi juga berkontribusi terhadap hambatan tersebut (Suing Alarcon-Llontop L. R & Bizberge A, 2024). Tantangan lainnya terletak pada kompetensi guru (Slavković M, Pavlovic K, Mamua Nikolic T, Vucenovic T & Bugarcic M, 2023; Tzafilkou K, Perifanou M. & Economides A. A., 2022). Lauricella A. R, Herdzina J. & Robb M. (2020) menemukan bahwa guru PAUD masih kesulitan mengajarkan aspek-aspek kewarganegaraan digital meskipun mereka menyadari urgensinya, sehingga perlu memperkuat kapasitas guru melalui modul dan kurikulum pendidikan guru.

Instrumen penilaian etiket digital, seperti *Digital Citizenship Scale* (DCS), dianggap perlu direvisi agar lebih mencerminkan kompleksitas perilaku anak muda (Fernández-Prados

J. S., Lozano-Díaz A. & Ainz-Galende A., 2021; Lozano-Díaz A. & Fernández-Prados J. S., 2020). Hal ini menggarisbawahi urgensi tinjauan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memetakan konsep etiket digital, mengidentifikasi strategi implementasi, dan mengeksplorasi tantangan serta peluang dalam pendidikan kewarganegaraan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemetaan konseptual yang komprehensif mengenai etiket digital dalam ranah pendidikan kewarganegaraan, yang sebelumnya masih terfragmentasi di berbagai kajian. Melalui SLR, penelitian ini tidak hanya menyajikan sintesis hasil penelitian terdahulu, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi lanjutan. Selain itu, hasil SLR berkontribusi dalam memperjelas hubungan antara literasi digital, tanggung jawab sosial, dan pembentukan karakter kewarganegaraan di era digital.

Manfaat praktis dari penelitian ini mencakup dukungan terhadap perumusan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti, pengembangan kurikulum yang adaptif dengan tuntutan digital, serta strategi pembelajaran yang menekankan perilaku media yang hormat, etis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, SLR ini diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi pendidik, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan integralistik di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), sebuah metode terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian yang ada mengenai topik tertentu. Menurut Kitchenham B. & Charters S. M. (2021), SLR merupakan pendekatan yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menafsirkan seluruh bukti yang relevan terhadap suatu pertanyaan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan observasi yang komprehensif dengan mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagaimana direkomendasikan oleh Moher D., Liberati A., Tetzlaff J., Altman D. G. & Prisma T. (2017), guna menjamin transparansi proses seleksi dan keandalan hasil analisis. Pendekatan SLR memungkinkan observasi komprehensif dengan mengikuti protokol seleksi dan analisis yang ketat, memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan digeneralisasi. Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian: "Bagaimana peran etiket digital dalam pendidikan kewarganegaraan dapat mendukung pengembangan karakter generasi muda di era digital?"

Strategi Pengumpulan dan Pencarian Data

Sumber data utama untuk penelitian ini adalah artikel ilmiah *peer-reviewed* yang diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks Scopus, yang menjamin standar kredibilitas akademis yang tinggi. Pencarian literatur awal dilakukan menggunakan mesin pencari Scopus dengan rumus pencarian berikut:

*TITLE-ABS-KEY(("digital etiquette" OR "netiquette")
AND ("civic education" OR "citizenship education")
AND ("youth" OR "young generation" OR "students"))*

Pencarian awal menghasilkan 312 artikel. Artikel-artikel ini kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Artikel yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025, ditulis dalam bahasa Inggris, dan diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dimasukkan dalam analisis. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, seperti yang hanya membahas bidang kedokteran, teknik, atau sains murni, tidak diproses lebih lanjut.

Proses penyaringan ini menghasilkan 190 artikel pada tahap abstrak dan judul. Setelah peninjauan teks lengkap, 142 artikel dikaji untuk peninjauan mendalam. Dari jumlah tersebut, 102 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan (92 artikel tidak relevan, 8 artikel tidak memberikan akses penuh, dan 2 artikel tidak ditulis dalam bahasa Inggris). Hal ini menyisakan 42 artikel yang memenuhi semua kriteria relevansi dan kualitas untuk analisis lebih lanjut (lihat Tabel 1 untuk kriteria penyaringan yang lebih rendah).

Setelah memilih analisis artikel, kami melanjutkan dengan VOSviewer. Perangkat lunak VOSviewer digunakan untuk memetakan hubungan antar kata kunci, mengungkap tren penelitian terkini, dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari literatur. Analisis ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fokus penelitian global pada etiket digital dalam pendidikan kewarganegaraan dan dampaknya terhadap generasi muda di era digital.

Pedoman PRISMA

Proses seleksi artikel dalam studi ini dilakukan sesuai dengan standar PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Page dkk., 2021), ini merupakan pedoman yang ketat untuk memastikan transparansi dan replikasi dalam tinjauan sistematis. Penerapan pedoman PRISMA memungkinkan pelaporan yang jelas tentang proses seleksi studi, sehingga meningkatkan visibilitas penelitian dengan mendokumentasikan setiap tahap penyaringan dan seleksi.

Pendekatan sistematis ini memungkinkan sintesis literatur yang kuat dan komprehensif, memberikan pemahaman mendalam tentang kontribusi etiket digital terhadap pendidikan kewarganegaraan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter generasi muda. Dengan berfokus pada artikel-artikel yang relevan, penelitian ini menghasilkan gambaran yang lebih terfokus tentang bagaimana etiket digital dipraktikkan dan diteliti dalam konteks pendidikan kewarganegaraan global dan lokal.

Proses seleksi artikel ini, yang dipandu oleh standar PRISMA (Page dkk., 2021), memastikan bahwa hanya studi yang memenuhi kriteria inklusi yang diikutsertakan, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam tentang integrasi etiket digital ke dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan menerapkan metode sistematis, studi ini menghasilkan sintesis literatur yang komprehensif, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang peran etiket digital sebagai kompetensi kewarganegaraan abad ke-21.

Tabel Ringkasan Kriteria Penyaringan menunjukkan bahwa artikel yang digunakan dalam penelitian ini diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2025. Hanya tulisan berbahasa Inggris yang dimuat dalam jurnal yang terindeks Scopus dan berorientasi pada masalah sosial, pendidikan, serta kewarganegaraan yang termasuk dalam analisis. Menurut kriteria ini, 42 artikel dinyatakan layak untuk diproses lebih lanjut dengan menggunakan diagram PRISMA.

Hanya artikel dari disiplin ilmu yang tidak secara langsung terhubung dengan fokus penelitian ini yang disertakan, seperti kedokteran, teknik, ilmu komputer, sains dasar, pertanian, energi, ilmu konservasi, matematika, biologi molekuler, ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Metode ini menjamin eksplorasi yang lebih mendalam dan terarah pada bidang studi tertentu, memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menekankan hubungan antara etiket digital, pendidikan kewarganegaraan, dan remaja.

Tab 1. Ringkasan Kriteria Pencarian (2020 – 2025)

Kriteria Penyaringan	Deskripsi	Jumlah Dokumen
<i>Search string</i>	<i>TITLE-ABS-KEY(("digital etiquette" OR "netiquette") AND ("civic education" OR "citizenship education") AND ("youth" OR "young generation" OR "students"))</i>	312
<i>Year</i>	Artikel dipublikasikan antara tahun 2020–2025	281
<i>Subject area</i>	Artikel dari bidang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, teknologi pendidikan. Artikel dari bidang medis, teknik, sains murni dikecualikan.	190
<i>Document type</i>	Hanya artikel jurnal (<i>research articles</i>) yang disertakan	142
<i>Source title</i>	Artikel dipublikasikan dalam jurnal bereputasi dan terindeks Scopus	142
<i>Publication stage</i>	Hanya artikel dengan status final (<i>published version</i>)	142
<i>Keywords</i>	Artikel dengan kata kunci relevan terkait etiket digital, pendidikan kewarganegaraan, dan generasi muda	120
<i>Affiliation</i>	Tidak dibatasi oleh afiliasi penulis	-
<i>Funding sponsor</i>	Tidak dibatasi oleh sumber pendanaan penelitian	-
<i>Country/territory</i>	Tidak dibatasi oleh negara asal penelitian	-
<i>Source type</i>	Jurnal ilmiah (<i>peer-reviewed journals</i>)	142
<i>Language</i>	Hanya artikel berbahasa Inggris	128
<i>Open access</i>	Artikel dengan akses terbuka penuh (<i>full-text available</i>)	76
<i>Final inclusion</i>	Artikel yang memenuhi seluruh kriteria relevansi dan kualitas untuk dianalisis lebih lanjut	42
Total	42 artikel jurnal	

HASIL DAN PEMBAHASAN

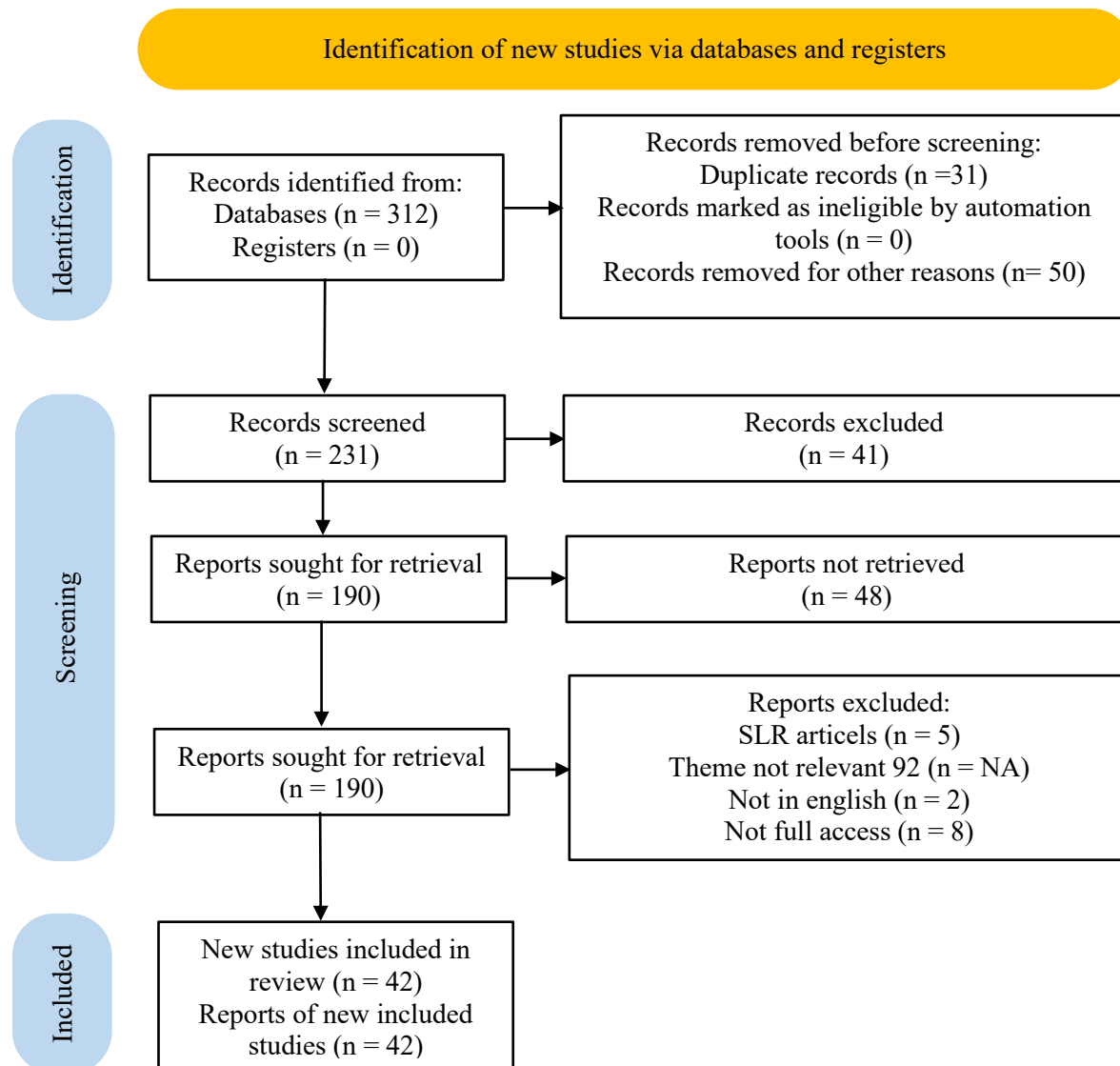
Tinjauan sistematis ini dibuat berdasarkan protokol yang ketat dan teliti guna memastikan akuntabilitas, integritas, serta transparansi dalam pelaporan. Diagram alir PRISMA berperan sebagai daftar verifikasi untuk menjamin kesempurnaan protokol penelitian serta membantu peneliti mengikuti pedoman dengan konsisten. Ini mengurangi kemungkinan bias dalam proses pemilihan dan penarikan kesimpulan.

Proses pengelolaan informasi melibatkan langkah-langkah pemilihan dan penyaringan dokumen yang diambil dari basis data Scopus. Pemilihan sumber data dilakukan dengan metode PRISMA, yang terdiri dari tiga langkah utama: (a) Identifikasi, (b) Penyaringan, dan (c) Kelayakan serta Inklusi. Hasil seleksi tahap kedua dapat dilihat pada Gambar 1 (Diagram Alir PRISMA).

Berdasarkan hasil penyaringan PRISMA, 42 artikel memenuhi syarat dan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan kerangka kerja PICOS. Proses penghapusan dilaksanakan secara berurutan dari jumlah 312 artikel yang didapatkan selama tahap pencarian awal. Pada tahap identifikasi, 31 artikel dihapus karena duplikasi, sedangkan 50 artikel lainnya dihapus karena tidak sesuai dengan cakupan penelitian (misalnya, membahas bidang medis, teknik, atau sains dasar). Jumlah ini menyisakan 231 artikel untuk tahap penyaringan judul dan abstrak.

Selain itu, pada tahap penyaringan, 41 artikel dihapus karena dianggap tidak relevan dengan topik penelitian. Dari 190 artikel yang diajukan untuk pencarian teks lengkap, 48 artikel tidak dapat diperoleh. Di tahap kelayakan, terdapat 142 artikel yang siap untuk dieksplorasi lebih lanjut. Namun, dari total tersebut, 5 artikel dihapus karena menjadi bagian dari tinjauan

sistematis yang berbeda, 92 artikel tidak sesuai dengan topik penelitian (tidak membahas etiket digital dalam konteks pendidikan kewarganegaraan atau kepemudaan), 2 artikel ditulis dalam bahasa yang bukan bahasa Inggris, dan 8 artikel tidak memiliki akses penuh. Oleh karena itu, setelah melewati seluruh proses penyaringan ketat sesuai dengan pedoman PRISMA 2020, 42 artikel dianggap memenuhi kriteria dan dimasukkan dalam analisis akhir penelitian ini.



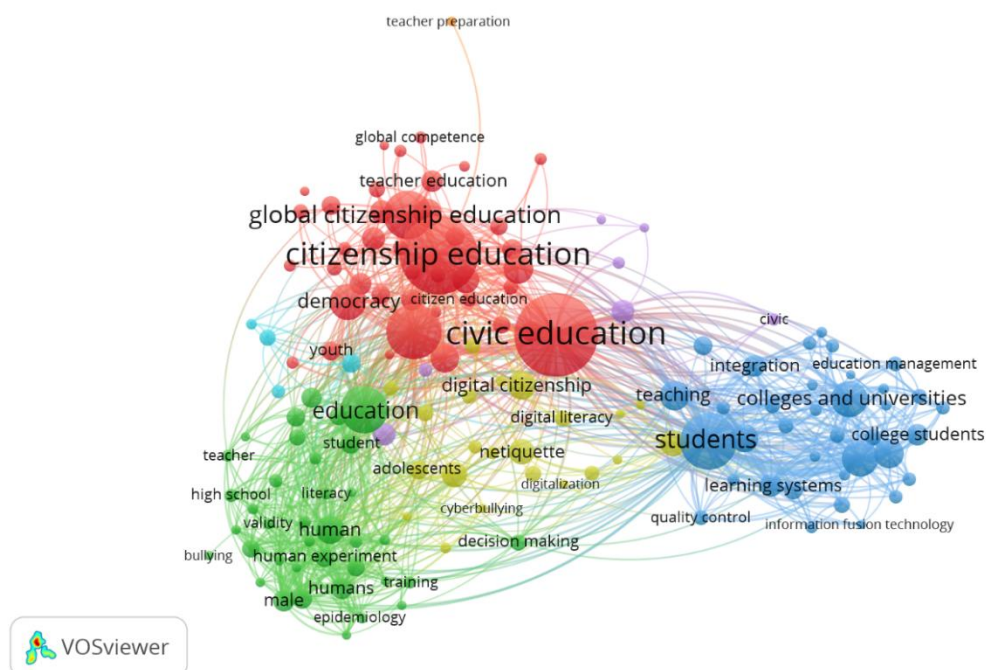
Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Peneliti selanjutnya memanfaatkan VOSviewer untuk menganalisis lebih dalam 42 artikel yang terpilih, dengan maksud untuk mengamati tren penelitian berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam judul dan abstrak yang relevan. Analisis ini menunjukkan keterkaitan antara istilah yang menggambarkan konsentrasi penelitian internasional mengenai tiket digital dalam pembelajaran kewarganegaraan. Tabel 2 menunjukkan kata kunci yang paling umum ditemukan dalam literatur, yang juga menjadi landasan pemetaan kluster penelitian dengan VOSviewer.

Tabel 2. Daftar Kata Kunci Utama Berdasarkan Analisis VOSviewer (2020 – 2025)

<i>Term</i>	<i>Occurences</i>	<i>Relevance Score</i>
<i>Citizenship education</i>	28	2.45
<i>Civic education</i>	24	2.30
<i>Students</i>	21	2.10
<i>Education</i>	19	2.05
<i>Global citizenship education</i>	15	1.95
<i>Digital citizenship</i>	13	1.90
<i>Democracy</i>	12	1.85
<i>Youth</i>	11	1.80
<i>Teacher education</i>	10	1.75
<i>Digital literacy</i>	9	1.70
<i>Netiquette</i>	8	1.65
<i>Social media / Cyberbullying</i>	7	1.60
<i>Human / Adolescents</i>	6	1.55
<i>Learning systems</i>	6	1.50
<i>Colleges and universities</i>	5	1.45

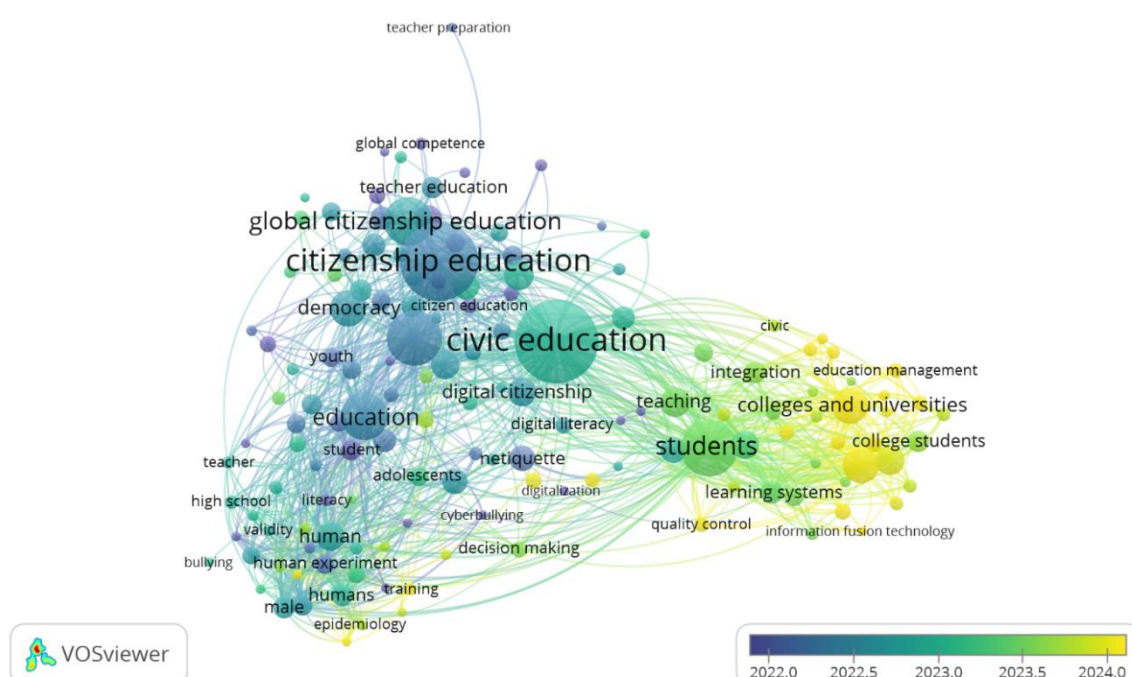
Dari hasil pemilihan kata kunci, terdapat sekitar 48 istilah yang saling terkait dengan tingkat kemunculan yang bervariasi, termasuk istilah-istilah seperti *citizenship education*, *civic education*, *students*, *digital citizenship*, *democracy*, *youth*, *netiquette*, dan *cyberbullying*. Visualisasi VOSviewer dari 42 artikel tersebut menghasilkan empat kluster utama yang ditampilkan dalam warna berbeda pada *network visualization* pada Gambar 2.



Gambar 2. *Network Visualization*

Gambar 2 memperlihatkan enam kluster penelitian yang diwakili dengan warna yang berbeda: merah, hijau, biru, kuning, ungu, dan biru muda. Ini mencerminkan tingkat tumpang tindih dan kedekatan yang dirasakan terhadap aplikasi. Contohnya, pada kluster merah, terdapat sejumlah istilah yang saling beririsan.

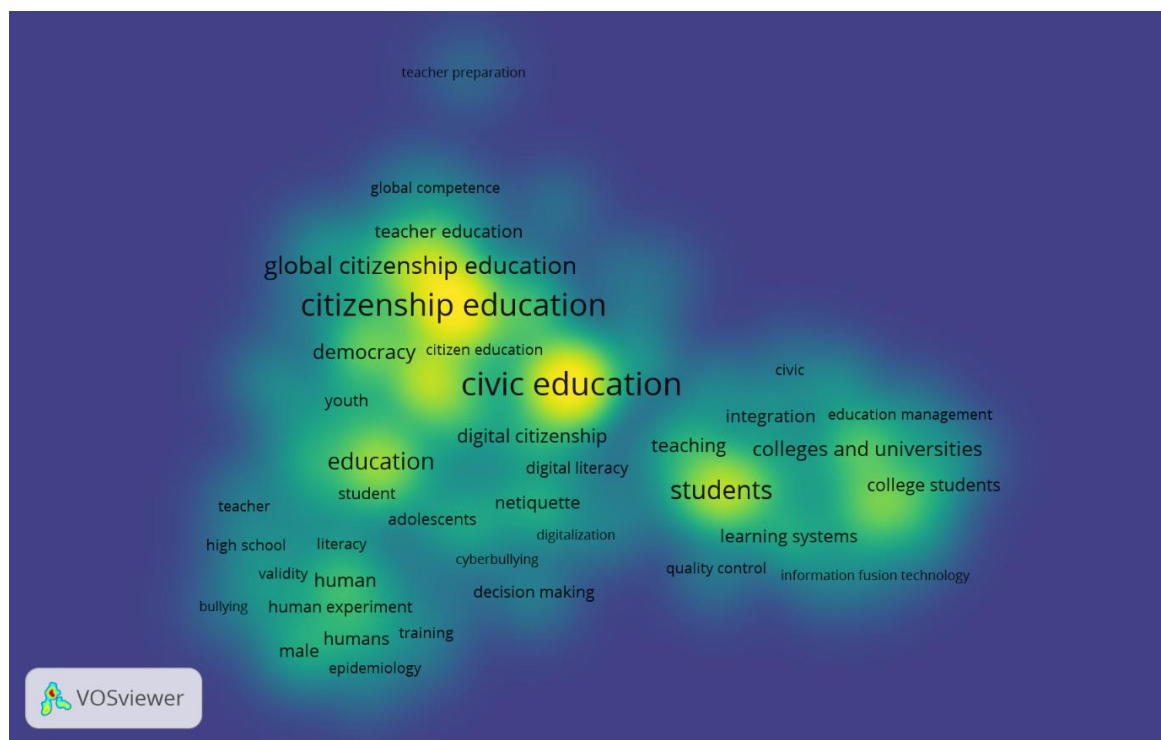
Sebaliknya, istilah yang muncul dari tampilan visualisasi dapat dilihat pada Gambar 3. *Overlay* itu menggambarkan tahun publikasi rata-rata, dan warna cerah menunjukkan tren penelitian dalam beberapa tahun terakhir di 42 artikel yang telah dianalisis. Kata-kata seperti *students*, *learning systems*, *colleges and universities*, *integration*, dan *education management* tampak menjadi titik perhatian dalam penelitian saat ini.



Gambar 3. *Overlay Visualization*

Banyak istilah baru yang berkaitan dengan tema pendidikan kewarganegaraan dan etiket digital. Keterkaitan antara *digital citizenship*, *digital literacy*, *netiquette*, dan *cyberbullying* menunjukkan tren penelitian yang semakin menekankan pentingnya literasi dan perilaku etis di ruang digital bagi kaum muda.

Lebih lanjut, istilah-istilah baru berdasarkan visualisasi kepadatan dapat diamati pada Gambar 4. *Density Visualization* menyoroti kata kunci yang paling sering muncul, dengan area yang lebih terang menunjukkan intensitas fokus penelitian yang lebih tinggi. Istilah-istilah seperti *citizenship education*, *civic education*, *students*, *digital citizenship*, dan *education* muncul sebagai kluster terpadat, yang mencerminkan peran sentral mereka dalam literatur yang dianalisis.



Gambar 4. *Density Visualization*

Etiket Digital sebagai Domain Pendidikan Kewarganegaraan

Hampir semua artikel yang diulas menekankan bahwa etiket digital merupakan aspek fundamental dari *digital citizenship* yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan generasi muda saat ini. Jika pada masa sebelumnya pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pemahaman terhadap norma hukum, aturan sosial, dan nilai-nilai moral dalam konteks interaksi tatap muka di dunia nyata, maka di era digital cakupan ini harus diperluas secara signifikan. Ruang digital telah menjadi arena baru bagi warga negara untuk berinteraksi, berpartisipasi, berekspresi, sekaligus membangun identitas sosial. Karena itu, perilaku di ruang virtual membutuhkan pedoman moral tersendiri yang relevan dengan karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan interaktif.

Etiket digital hadir sebagai pedoman tersebut, memberikan arah bagi pengguna teknologi untuk berperilaku sopan, bertanggung jawab, dan penuh pertimbangan. Pedoman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara berkomunikasi di media sosial secara santun, cara mengelola dan membagikan informasi secara kritis, hingga menjaga keamanan dan privasi diri sendiri maupun orang lain. Di tengah maraknya interaksi digital yang berlangsung tanpa hambatan jarak maupun waktu, kemampuan untuk menjaga etika dan kesopanan menjadi sangat krusial agar ruang digital tidak berubah menjadi tempat yang penuh konflik, misinformasi, atau tindakan merugikan lainnya.

Lebih lanjut, etiket digital berfungsi sebagai benteng moral yang dapat melindungi individu dari berbagai risiko dan dampak negatif dunia maya. Fenomena seperti *cyberbullying*, penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian, perundungan daring, hingga pencurian identitas menunjukkan bahwa ruang digital memiliki potensi bahaya yang tidak bisa diabaikan. Dengan menanamkan prinsip-prinsip kesopanan digital sejak dini, siswa tidak hanya mampu melindungi diri mereka sendiri dari ancaman tersebut, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan ekosistem digital yang sehat, aman, dan harmonis. Hal ini sejalan dengan temuan Alrahman R., Budimansyah D., Sapriya S. & Rahmat R. (2024) dan Heitmayer M. & Schimmelpfennig R. (2024), yang memandang netiket sebagai bentuk norma

sosial baru yang diperlukan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat digital yang semakin kompleks.

Selain itu, etiket digital memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter yang sangat relevan dengan pendidikan kewarganegaraan, seperti empati, toleransi, dan rasa hormat. Berinteraksi melalui layar sering kali membuat individu lupa bahwa di balik setiap akun terdapat manusia dengan perasaan, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda. Dengan memahami dan menerapkan etiket digital, siswa dapat belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan meskipun tidak saling berhadapan langsung. Prinsip ini memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan yang menekankan sikap menghargai keberagaman, menjunjung hak orang lain, serta menjaga integritas dalam komunikasi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan modern harus bertransformasi agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Tidak cukup hanya menekankan aspek hukum, aturan sosial, atau hak formal warga negara; pendidikan kewarganegaraan harus mengintegrasikan etika digital sebagai dimensi baru yang sama pentingnya dengan nilai-nilai kewarganegaraan tradisional. Integrasi ini memungkinkan pembentukan warga negara digital yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga beretika, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan di dunia maya. Pendidikan kewarganegaraan yang adaptif terhadap kebutuhan digital merupakan fondasi bagi generasi muda untuk tumbuh sebagai warga negara yang bijak baik dalam kehidupan nyata maupun dalam ruang virtual.

Efektivitas Integrasi Kurikulum dan Program

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa mengintegrasikan etiket digital ke dalam kurikulum formal dan informal memiliki dampak positif yang signifikan. Sebuah studi oleh Alenezi N., & Alfaleh M. (2024) di Arab Saudi menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar yang berpartisipasi dalam pembelajaran kewarganegaraan digital memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap perilaku sopan santun daring. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam studi oleh Ahyati I. U., Sya'rawi H., & Permatasari L. (2023) di Banjarmasin, di mana program sosialisasi netiquette meningkatkan literasi digital siswa sekolah menengah atas. Di Peru, Buchan M. C., Bhawra J., & Katapally T. (2024) melaporkan bahwa program berbasis bukti untuk remaja meningkatkan keterampilan literasi digital sekaligus menumbuhkan perilaku etis dalam interaksi yang menarik.

Namun, keberhasilan program-program ini sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pendidikan nasional. Di Indonesia, misalnya, meskipun literasi digital telah mulai diperkenalkan, integrasinya ke dalam kurikulum formal Kewarganegaraan masih belum konsisten. Banyak sekolah memandang literasi digital hanya sebagai kegiatan tambahan, alih-alih sebagai komponen inti pembelajaran Kewarganegaraan. Akibatnya, implementasi di lapangan seringkali sporadis dan bergantung pada inisiatif guru. Situasi ini menggarisbawahi perlunya regulasi pemerintah yang lebih kuat untuk memastikan bahwa etika digital benar-benar menjadi bagian standar dari kurikulum nasional.

Peran Guru dan Lingkungan Sekolah

Guru memegang posisi strategis dalam membentuk perilaku digital siswa. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai *role model* dalam menunjukkan bagaimana teknologi seharusnya digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan bijaksana. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan digital, tindakan dan sikap

guru sering kali menjadi rujukan utama bagi siswa dalam memahami batasan moral di ruang digital. Keteladanan ini mencakup hal-hal sederhana seperti cara berkomunikasi melalui grup kelas, cara memberikan umpan balik secara daring, hingga bagaimana guru mengelola informasi pribadi dan keamanan digital.

Namun, kenyataannya masih banyak guru yang belum memiliki kesiapan memadai untuk menjalankan peran tersebut. . Lauricella A. R., Herdzina J., & Robb M. (2020) mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar guru pendidikan anak usia dini di Amerika Serikat menyadari pentingnya kewarganegaraan digital, mereka sering kali kekurangan strategi pedagogis yang tepat untuk mengajarkannya. Mereka memahami urgensinya, tetapi tidak dibekali dengan pengetahuan praktis mengenai cara menyisipkan nilai-nilai etiket digital ke dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. Kondisi ini juga tampak di Indonesia. Kurangnya pelatihan yang terstruktur, minimnya modul pembelajaran, serta ketidaktahuan guru terhadap dinamika platform digital yang digunakan siswa menyebabkan pendidikan etika digital berjalan tidak optimal. Banyak guru terjebak pada pendekatan normatif yang cenderung menekankan larangan, alih-alih membangun kesadaran kritis siswa.

Penelitian Akhwani (2020) di sekolah dasar Surabaya memberikan gambaran bahwa guru yang diberdayakan melalui strategi pengembangan karakter dan pelatihan mengenai jejak digital (*digital footprint*) memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam membimbing perilaku digital siswa. Strategi tersebut tidak hanya menekankan pemahaman teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab. Siswa diajak memahami bahwa setiap tindakan di dunia digital meninggalkan rekam jejak yang dapat berdampak pada reputasi dan keselamatan mereka. Metode seperti diskusi kasus, simulasi interaksi daring, dan refleksi perilaku digital terbukti lebih efektif dibanding sekadar ceramah mengenai aturan.

Lingkungan sekolah yang suportif juga memainkan peran penting. Dukungan kepala sekolah, kebijakan internal yang jelas mengenai penggunaan teknologi, serta budaya sekolah yang mendorong keterbukaan dan diskusi mengenai etika digital dapat memperkuat peran guru dalam membentuk perilaku siswa. Tanpa dukungan struktural tersebut, guru sering kali bekerja sendiri menghadapi masalah digital siswa, seperti *cyberbullying*, *plagiarisme*, atau penyalahgunaan media sosial.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru melalui program pelatihan yang berkelanjutan, lokakarya berbasis praktik, serta penyediaan modul pembelajaran etika digital menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek teknis, sosial, dan moral dari penggunaan teknologi. Tanpa guru yang kompeten dan percaya diri dalam mengelola pembelajaran digital, pendidikan etika digital akan tetap berada pada tataran wacana dan tidak mampu memberikan dampak nyata dalam membentuk generasi muda yang beretika di ruang digital. Program pemberdayaan guru ini sekaligus memastikan bahwa pendidikan etiket digital menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, bukan sekadar sisipan atau materi tambahan yang terpinggirkan.

Instrumen Evaluasi dan Standarisasi

Keberadaan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel sangat penting untuk mengukur efektivitas pendidikan etiket digital, terutama karena perilaku digital merupakan fenomena yang kompleks, dinamis, dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Instrumen yang baik diperlukan agar pendidik, peneliti, maupun pembuat kebijakan dapat memahami sejauh mana siswa telah menginternalisasi nilai-nilai etiket digital dan bagaimana intervensi pendidikan dapat ditingkatkan. Connolly R. & Miller J. (2022) melalui pengembangan *Digital Citizenship Scale* (DCS) menekankan bahwa banyak alat ukur yang tersedia saat ini masih bersifat umum

dan belum sepenuhnya menggambarkan dinamika perilaku digital generasi muda. Mereka menunjukkan perlunya revisi agar skala tersebut mampu menangkap perkembangan platform digital, pola interaksi baru, serta perubahan norma sosial yang terus berkembang.

Upaya untuk menghasilkan instrumen yang lebih spesifik dilakukan oleh Zheng Y., Zhang J., Li Y., Wu X., Ding R., Luo X., Liu P., & Huang J. (2024), yang mengembangkan *Digital Etiquette Situation Scale* khusus untuk siswa SMP. Instrumen ini memuat 24 item yang dirancang untuk mengukur respons siswa terhadap berbagai situasi digital, seperti berkomunikasi melalui media sosial, mengomentari unggahan teman, membagikan informasi, hingga menghadapi potensi konflik digital. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut layak digunakan sebagai alat penilaian formal. Kehadiran instrumen berbasis situasi seperti ini sangat penting karena membantu memetakan perilaku siswa dalam konteks yang lebih realistis dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang kemampuan mereka menerapkan etiket digital.

Namun, persoalan utama yang kemudian muncul adalah adanya perbedaan budaya antar negara dan masyarakat. Apa yang dianggap sopan, pantas, atau etis di Asia Tenggara belum tentu sesuai dengan norma sosial di Eropa atau Amerika Latin. Misalnya, penggunaan emotikon tertentu di Jepang dapat dianggap berlebihan dalam konteks formal, sedangkan di Amerika Latin emotikon justru digunakan untuk memperkuat kehangatan komunikasi. Cara menyapa, pilihan kata, tingkat keterbukaan dalam membagikan informasi pribadi, serta batasan humor juga sangat bervariasi berdasarkan budaya. Perbedaan ini menciptakan tantangan besar bagi pembuatan instrumen evaluasi yang bersifat universal.

Kasus lainnya dapat dilihat dari budaya digital Indonesia, di mana kebiasaan menggunakan bahasa campuran (bahasa Indonesia, daerah, dan bahasa gaul) memengaruhi cara siswa membangun kesopanan digital. Sementara itu, di negara-negara Eropa Barat, kesopanan digital lebih banyak terkait dengan kejelasan, formalitas komunikasi, dan penghargaan terhadap privasi. Perbedaan seperti ini menunjukkan bahwa instrumen evaluasi etiket digital yang diterapkan secara global bisa menghasilkan penilaian yang tidak akurat jika tidak disesuaikan dengan konteks budaya pengguna.

Oleh karena itu, adaptasi instrumen secara lokal menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Instrumen yang baik harus mempertimbangkan nilai budaya, kebiasaan komunikasi, dan norma sosial masyarakat setempat agar hasil evaluasinya benar-benar relevan dan dapat diterapkan dalam kebijakan pendidikan. Meskipun standardisasi global tetap penting sebagai kerangka acuan umum, kepekaan terhadap keragaman budaya merupakan kunci agar evaluasi etiket digital tidak hanya mengukur perilaku, tetapi juga memahami konteks yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pengembangan instrumen evaluasi perlu melalui proses validasi lintas budaya (*cross-cultural validation*) agar mampu mencerminkan realitas perilaku digital di berbagai wilayah secara lebih adil dan komprehensif.

Faktor Individu dan Sosial

Selain aspek struktural, faktor individu dan sosial juga berpengaruh signifikan terhadap perilaku etiket digital. Temuan Putri A. P., Purnama N., Andini P. F., & Riany Y. E. (2024) menunjukkan bahwa *emotional intelligence* dan *self-control* merupakan dua prediktor yang sangat kuat dalam membentuk perilaku digital yang etis. Hal ini berarti bahwa kemampuan siswa untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri berkontribusi besar terhadap bagaimana mereka merespons situasi di ruang digital. Siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih mampu menahan diri dari perilaku impulsif, menghindari konflik daring yang tidak perlu, serta lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Demikian pula, kemampuan pengendalian diri memungkinkan siswa

mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya sebelum bertindak, sehingga mereka lebih santun, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam interaksi daring.

Lebih jauh lagi, faktor sosial seperti keterikatan dengan teman sebaya juga memainkan peran penting. Keterikatan ini dapat muncul dalam bentuk dukungan emosional, imitasi perilaku, hingga tekanan sosial. Dalam konteks media sosial, pengaruh teman sebaya seringkali bersifat tidak langsung misalnya melalui norma kelompok, gaya komunikasi, atau tren perilaku yang populer. Ketergantungan pada validasi teman sebaya dapat mendorong siswa untuk menyesuaikan perilakunya, termasuk dalam konteks etika digital. Jika lingkungan sosial mereka menjunjung tinggi kesopanan dan tanggung jawab dalam interaksi digital, maka kecenderungan siswa untuk berperilaku etis meningkat. Sebaliknya, jika kelompok sebaya terbiasa dengan perilaku negatif seperti flaming, penyebaran hoaks, atau komentar agresif, maka risiko perilaku tidak etis menjadi lebih besar.

Penelitian lain di Peru oleh Gebera O. T., Rosales-MARquea C., Gutierrez-Aguilar O., Chirinos-Tovar K., Ramirez-Garcia A., & Aguaded I. (2025) menegaskan pentingnya literasi media kritis sebagai fondasi pembentukan kewarganegaraan digital. Siswa yang memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi cenderung lebih waspada terhadap misinformasi dan manipulasi digital. Mereka lebih berhati-hati dalam berinteraksi, tidak mudah terpancing oleh provokasi daring, serta mampu membuat keputusan yang lebih rasional. Literasi media kritis membantu siswa memahami konteks sosial-politik dari informasi yang mereka konsumsi, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarkan konten.

Oleh karena itu, pembelajaran etiket digital tidak seharusnya hanya berfokus pada pemahaman teknis mengenai aturan atau tata cara berkomunikasi di internet. Pendidikan etiket digital harus mencakup pengembangan *soft skills* yang relevan, seperti empati, kesadaran kritis, dan kemampuan pengendalian diri. Ketiga kompetensi ini berperan penting dalam membentuk perilaku digital yang tidak hanya sesuai norma, tetapi juga mencerminkan kualitas moral dan kematangan yang diperlukan seorang warga negara digital. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, pendidikan etiket digital dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam menyiapkan generasi muda agar mampu berpartisipasi secara etis, bersama, dan bertanggung jawab di ruang digital yang semakin kompleks.

Tantangan Global

Pendidikan etiket digital menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan persoalan kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai wilayah. Di wilayah Andes, misalnya, Suing A., Alarcon-Llontop L. R., & Bizberge A. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses internet membuat siswa sulit memperoleh pengalaman langsung dalam mempraktikkan digital citizenship. Keterbatasan akses tersebut tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tetapi juga menciptakan ketimpangan kesempatan antar kelompok sosial. Hanya mereka yang memiliki jaringan internet stabil dan perangkat memadai yang bisa mendapatkan manfaat penuh dari pendidikan etiket digital, sementara kelompok lain tertinggal dan semakin tersisih dari perkembangan literasi digital global. Kondisi ini memperkuat kesenjangan sosial, pendidikan, dan partisipasi digital.

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana perbedaan kualitas infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menghambat pemerataan pendidikan digital. Di beberapa daerah, sekolah masih menghadapi keterbatasan jaringan, kurangnya perangkat pembelajaran digital, serta rendahnya literasi teknologi pada guru maupun siswa. Situasi ini menyebabkan implementasi pendidikan etiket digital berjalan tidak merata. Sementara sebagian siswa di daerah maju sudah terlibat dalam aktivitas pembelajaran digital yang

kompleks, siswa di daerah lain harus berjuang dengan akses dasar, sehingga proses internalisasi nilai etik digital sulit berlangsung secara optimal.

Selain persoalan infrastruktur, tantangan lain yang sama pentingnya adalah laju perkembangan teknologi yang sangat cepat. Platform media sosial, aplikasi komunikasi, serta pola interaksi digital terus berubah dalam waktu singkat. Perubahan ini menuntut kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan perangkat pembelajaran digital untuk selalu diperbarui dan disesuaikan. Tanpa respons yang adaptif, pendidikan etik digital berisiko tertinggal, tidak relevan, dan gagal mencapai tujuan pembentukan karakter digital yang beretika. Guru dan lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami tren digital terkini agar dapat mengajarkan praktik etika yang sesuai dengan konteks nyata yang dialami siswa.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan inklusi digital yang komprehensif, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan tersebut harus memastikan pemerataan akses internet, peningkatan kapasitas guru, penyediaan perangkat pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang responsif terhadap dinamika digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pertumbuhan literasi digital yang adil dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, pendidikan etik digital dapat berfungsi secara optimal sebagai landasan pembentukan warga negara digital yang beretika dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa integrasi etik digital dalam pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa pembentukan karakter warga negara muda tetap relevan dengan tantangan zaman. Melalui telaah sistematis terhadap berbagai penelitian internasional, kajian ini merefleksikan bahwa etika digital berperan sebagai fondasi moral baru yang membentuk bagaimana generasi muda berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di ruang digital yang semakin kompleks. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dapat dibatasi pada interaksi sosial tatap muka, melainkan harus merespons transformasi budaya digital dengan menanamkan kemampuan kritis, empati, dan tanggung jawab yang sesuai dengan dinamika masyarakat digital. Lebih jauh, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi etik digital tidak hanya bergantung pada kurikulum atau instrumen penilaian, tetapi juga pada kesiapan ekosistem pendidikan termasuk kompetensi guru, dukungan kebijakan, serta kesenjangan digital yang masih menjadi tantangan di banyak negara. Refleksi mendalam ini menunjukkan bahwa pendidikan etika digital menuntut kolaborasi multisektor dan pembaruan paradigma pendidikan agar mampu menjawab kebutuhan nyata generasi muda. Secara metodologis, penggunaan pendekatan SLR memberikan gambaran komprehensif mengenai arah perkembangan penelitian, namun refleksi terhadap tahap ini juga mengungkapkan keterbatasannya: ketergantungan pada publikasi yang tersedia dapat membatasi pemahaman terhadap kondisi empiris di lapangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan berbasis empiris untuk memvalidasi, menguji, dan memperkaya kerangka konseptual yang telah dibangun. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan sintesis literatur, tetapi juga menyajikan refleksi kritis mengenai urgensi rekonstruksi pendidikan kewarganegaraan di era digital bahwa membangun warga negara yang beretika bukanlah tugas sektor tunggal, melainkan agenda kolektif untuk memastikan bahwa ruang digital menjadi arena partisipasi yang sehat, inklusif, dan beradab bagi generasi kini maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyati, I. U., Sya'rawi, H., & Permanasari, L. (2023). Etika Berinternet (Netiket) untuk Meningkatkan Literasi Digital Pelajar di SMAN 2 Banjarmasin. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 175–180. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4151>
- Akhwani. (2020). Strategy of digital etiquette education of elementary school students. *Journal of Elementary Education Volume*, 3(2), 43–54. <https://doi.org/https://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/primaryedu/article/view/1378>
- Alenezi, N., & Alfaleh, M. (2024). Enhancing digital citizenship education in Saudi Arabian elementary schools: designing effective activities for curriculum integration. *Frontiers in Education*, 9(November), 1–18. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1494487>
- Alrahman, R., Budimansyah, D., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2024). The effect of digital citizenship on the quality learning civic education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 29–40. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.67086>
- Assante, G. M., Popa, N. L., & Momanu, M. (2022). How personal values and critical dispositions support digital citizenship development in higher education students. *Frontiers in Psychology*, 13(October), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.990518>
- Bal, E., & Akcil, U. (2024). The Implementation of a Sustainable Online Course for the Development of Digital Citizenship Skills in Higher Education. *Sustainability (Switzerland)*, 16(1). <https://doi.org/10.3390/su16010445>
- Buchan, M. C., Bhawra, J., & Katapally, T. R. (2024). Navigating the digital world: development of an evidence-based digital literacy program and assessment tool for youth. *Smart Learning Environments*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00293-x>
- Connolly, R., & Miller, J. (2022). Evaluating and Revising the Digital Citizenship Scale. *Informatics*, 9(3), 1–13. <https://doi.org/10.3390/informatics9030061>
- Damiani, V., & Fraillon, J. (2025). Civic and citizenship education, global citizenship education, and education for sustainable development: an analysis of their integrated conceptualization and measurement in the international civic and citizenship education study (ICCS) 2016 and 2022. *Large-Scale Assessments in Education*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s40536-025-00237-y>
- Fernández-Prados, J. S., Lozano-Díaz, A., & Ainz-Galende, A. (2021). Measuring digital citizenship: A comparative analysis. *Informatics*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.3390/informatics8010018>
- Gebera, O. T., Rosales-Márquez, C., Gutiérrez-Aguilar, O., Chirinos-Tovar, K., Ramírez-García, A., & Aguaded, I. (2025). Media literacy and digital citizenship: Student self-perceptions in a Peruvian university. *Desde El Sur*, 17(3), 1–30. <https://doi.org/10.21142/DES-1703-2025-0053>
- Hamayel, H. J., & Hawamdeh, M. M. (2022). Methods Used in Digital Citizenship: A Systematic Literature Review. *Journal of Digital Educational Technology*, 2(3), ep2207. <https://doi.org/10.30935/jdet/12520>
- Han, J. (2022). An Information Ethics Framework Based on ICT Platforms. *Information (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/info13090440>
- Heitmayer, M., & Schimmelpfennig, R. (2024). Netiquette as Digital Social Norms. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(13), 3334–3354. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2188534>
- Hidayat, M. L., Hariyatmi, Astuti, D. S., Sumintono, B., Meccawy, M., & Khanzada, T. J. S. (2023). Digital competency mapping dataset of pre-service teachers in Indonesia. *Data in*

- Brief*, 49, 109310. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109310>
- Kitchenham, B., & Charters, S. M. (2021). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. *EBSE Technical Report*.
- Lauricella, A. R., Herdzina, J., & Robb, M. (2020). Early childhood educators' teaching of digital citizenship competencies. *Computers and Education*, 158(January), 103989. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103989>
- Lozano-Díaz, A., & Fernández-Prados, J. S. (2020). Educating digital citizens: An opportunity to critical and activist perspective of sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187260>
- Mangkhang, C., & Kaewpanya, N. (2021). The Digital Etiquette Enhancing to Global Citizenship of Social Studies Teachers in a New Normal Society. *Higher Education Studies*, 11(3), 89. <https://doi.org/10.5539/hes.v11n3p89>
- Milenkova, V., & Lendzhova, V. (2021). Digital Citizenship and Digital Literacy in the Conditions of Social Crisis. *Computers*, 10(40), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/computers10040040>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma, T. (2017). *Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement*. 8. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2010.02.007>
- Prasetyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2021). Digital citizenship trend in educational sphere: A systematic review. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(4), 1192–1201. <https://doi.org/10.11591/IJERE.V10I4.21767>
- Putri, A. P., Purnama, N., Andini, P. F., & Riany, Y. E. (2024). Mastering Digital Ethic: Uncovering the Influence of Self-Control, Peer Attachment, and Emotional Intelligence on Netiquette through Adolescent Social Media Exposure. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 71–82. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.71218>
- Slavković, M., c. (2024). Effects of Digital Citizenship and Digital Transformation Enablers on Innovativeness and Problem-Solving Capabilities. *Applied Sciences (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/app14114827>
- Slavković, M., Pavlović, K., Mamula Nikolić, T., Vučenović, T., & Bugarčić, M. (2023). Impact of Digital Capabilities on Digital Transformation: The Mediating Role of Digital Citizenship. *Systems*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/systems11040172>
- Soler-Costa, R., Lafarga-Ostáriz, P., Mauri-Medrano, M., & Moreno-Guerrero, A. J. (2021). Netiquette: Ethic, education, and behavior on internet—a systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031212>
- Suing, A., Alarcon-Llontop, L. R., & Bizberge, A. (2024). Appreciations and practices of digital citizenship in the Andean community. *Frontiers in Communication*, 9(2007). <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1336528>
- Tangül, H., & Soykan, E. (2021). Comparison of Students' and Teachers' Opinions Toward Digital Citizenship Education. *Frontiers in Psychology*, 12(November), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.752059>
- Tzafilkou, K., Perifanou, M., & Economides, A. A. (2022). Development and validation of students' digital competence scale (SDiCoS). *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-022-00330-0>
- Zheng, Y., Zhang, J., Li, Y., Wu, X., Ding, R., Luo, X., Liu, P., & Huang, J. (2024). Effects of digital game-based learning on students' digital etiquette literacy, learning motivations, and engagement. *Heliyon*, 10(1), e23490. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23490>

